



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project**<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>**

Penyusunan Bahan Ajar Administrasi Perpajakan Kelas Xi Pada Smks Maitreyawira Tanjungpinang

Robby Krisyadi¹, Miranda Irawan²

Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: robby.krisyadi@uib.ac.id, 1742137.miranda@uib.edu

Abstrak

Penyebaran virus Covid-19 menyebabkan pelaksanaan proses belajar mengajar sekolah harus dilakukan secara jarak jauh. Hal ini menyebabkan terdapat kesulitan bagi peserta didik yang tidak terbiasa menggunakan media *online* dalam pembelajarannya. Penyusunan bahan ajar ini dilakukan untuk mempermudah guru sekolah dalam menyampaikan materi pembelajaran dan juga para peserta didik dalam memahami materi pembelajarannya secara mandiri. Adapun hasil dari kegiatan ini ditujukan untuk SMKS Maitreyawira Tanjungpinang. Bahan ajar yang disusun terdiri dari modul dan *slide* presentasi pembelajaran Administrasi Perpajakan kelas XI yang merujuk pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam silabus mata pelajaran dari pihak sekolah. Materi pokok yang disampaikan pada bahan ajar untuk setiap bab nya yaitu Konsep Dasar Perpajakan, Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Bentuk-Bentuk Dokumen Pajak, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang, serta Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Dengan adanya modul pembelajaran dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pemahaman materi secara mandiri oleh para peserta didik, dan adanya *slide* presentasi dapat digunakan oleh guru pengajar di dalam menyampaikan materi pembelajarannya.

Abstract

The spread of the Covid-19 virus causes school teaching and learning process to be done remotely. This causes difficulties for students who are not accustomed to using online media in their learning. The arrangement of this teaching material is to make it easier for teacher in delivering the learning material and also for students to understand it independently. The results of this activity were addressed to SMKS Maitreyawira Tanjungpinang. The teaching materials that are compiled consist of modules and presentation slides for grade 11 Tax Administration subject which refer to basic competencies and indicators of competency achievement in the subject syllabus of the school. The main materials presented in the teaching materials for each chapter are Konsep Dasar Perpajakan, Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Bentuk-Bentuk Dokumen Pajak, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang, and

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. With the learning module it can be useful as a reference in understanding the material independently by students, and the presence of presentation slides can be used by the teacher in delivering the learning material.

Keywords: *Teaching Material, Tax Administration, Learning Module, Learning Presentation Slides.*

Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003).

SMK memiliki program keahlian yang dilaksanakan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dunia kerja, permintaan masyarakat, dan pasar. Peserta didik dapat memilih salah satu dari beberapa program tersebut sesuai yang diminati. Kurikulum yang diterapkan pada SMK disusun dengan tujuan untuk mendidik para peserta didik agar berkompeten dan siap beradaptasi di lingkungan kerja. Dengan masa studi sekitar tiga atau empat tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni ataupun sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Timbulnya virus Covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020, memberikan dampak yang luar biasa hampir pada seluruh bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus Covid-19, pemerintah pusat sampai pada

tingkat daerah memberikan kebijakan mengenai proses pembelajaran yang berubah dari tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah (Suara.com, 2020). Hal ini merujuk pada aturan yang ditetapkan pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu SMKS Maitreyawira Tanjungpinang yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu solusi untuk menerapkan pembatasan sosial guna mencegah mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Karena pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan secara *online* atau pembelajaran yang dapat dilakukan peserta didik dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan. Sehingga dapat menghindari kerumunan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menerapkan pembatasan sosial (Handarini & Wulandari, 2020).

Media yang digunakan sebagai perantara antara guru dan peserta didik di dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh terdiri dari beberapa media *online* seperti Whatsapp, Google Meet, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, dan lain-lain. Tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat beberapa keterbatasan dan

kekurangan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Tidak semua peserta didik dapat terbiasa menggunakan media *online* dan juga memanfaatkan akses internet di dalam menelusuri informasi pengetahuan mengenai mata pelajarannya. Para guru juga dituntut harus lebih inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran, termasuk memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena untuk mempermudah proses pembelajaran jarak jauh inilah yang membuat penulis ingin menyusun bahan ajar, khususnya untuk mata pelajaran Administrasi Perpajakan kelas XI.

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun bahan ajar berupa modul dan *slide* presentasi materi pembelajaran Administrasi Perpajakan kelas XI dengan merujuk pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam silabus mata pelajaran yang ditetapkan oleh pihak SMKS Maitreyawira Tanjungpinang, untuk dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar diharapkan dapat membantu guru dalam mengajar dan mempermudah para siswa dalam menerima ataupun memahami materi yang disampaikan oleh guru pengajar, tidak peduli proses pembelajarannya nanti dilakukan secara tatap muka ataupun jarak jauh.

Metode

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1) Teknik wawancara dan survei
Metode survei yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu melakukan wawancara dengan pihak

sekolah dan peninjauan berkaitan kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan, kurikulum yang digunakan, serta silabus mata pelajaran yang diterapkan.

2) Studi literatur

Mengumpulkan sumber tertulis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan materi pembelajaran ke dalam bentuk bahan ajar. Sumber yang digunakan berupa artikel, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain sebagainya yang relevan dengan materi pembelajaran.

Jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis, akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah serta rapat virtual bersama dosen prodi (01 Oktober 2020 – 11 Oktober 2020).
- 2) Mengajukan proposal PkM kepada dosen pembimbing dan prodi (12 Oktober 2020).
- 3) Menerima silabus mata pelajaran serta diskusi dengan guru sekolah mengenai luaran bahan ajar yang akan dikerjakan (13 Oktober 2020).
- 4) Menyusun bahan ajar berupa modul dan *slide* presentasi pembelajaran disertai dengan konsultasi kepada dosen pembimbing dan guru sekolah (14 Oktober 2020 – 31 Januari 2021).
- 5) Melakukan finalisasi dan penyerahan bahan ajar kepada pihak sekolah.

Pembahasan

Luaran kegiatan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bahan ajar berupa modul dan *slide* presentasi materi pembelajaran

Administrasi Perpajakan kelas XI. Modul dan *slide* presentasi yang disusun selalu mengikuti kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam silabus mata pelajaran yang ditetapkan oleh pihak SMKS Maitreyawira Tanjungpinang, serta juga sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh guru yang mengajar. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik oleh peserta didik.

Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan (Azizah, 2017). Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi yang bersifat spesifik, aktual, dan terukur serta sesuai dengan yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran (Ruangguruku.com, 2012). Tujuan pembelajaran dan materi pokok yang disampaikan pada perancangan bahan ajar untuk setiap bab akan dibahas lebih lengkap melalui penjelasan di bawah ini.

BAB I : Konsep Dasar Perpajakan.

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu memahami jenis-jenis pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengelompokkan jenis-jenis pajak, dan tata cara perpajakan. Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang definisi pajak, unsur pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, kedudukan hukum pajak, hukum pajak materiil dan hukum pajak formil,

pengelompokan pajak, tata cara pemungutan pajak, tarif pajak, pungutan lain selain pajak, serta pajak negara dan pajak daerah.

BAB II : Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu menerapkan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat surat permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengertian NPWP, fungsi dan manfaat NPWP, sanksi NPWP, pendaftaran NPWP, tata cara memperoleh NPWP, penghapusan NPWP, serta format NPWP.

BAB III : Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu menerapkan permohonan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), membuat surat permohonan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang pengertian dan fungsi nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP), syarat pengajuan PPKP, syarat penolakan permohonan PPKP, syarat pencabutan PPKP, pengajuan permohonan PPKP, serta permohonan pencabutan PPKP.

BAB IV : Bentuk-Bentuk Dokumen Pajak.

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu memahami dan mengelompokkan bentuk-bentuk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP),

Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan SSE (Surat Setoran Elektronik), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

BAB V : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu menganalisis data pembuatan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang definisi dan dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak PPh Pasal 21, objek pajak PPh Pasal 21, komponen-komponen perhitungan PPh Pasal 21, tarif PPh Pasal 17, tarif pajak dan penerapannya, tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima yang tidak mempunyai NPWP, saat terutang PPh Pasal 21, contoh penghitungan PPh Pasal 21, serta pengisian SPT PPh 21.

BAB VI : Surat Setoran Pajak (SSP). Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu menerapkan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21,

melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21. Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang pengertian dan fungsi SSP, jenis-jenis SSP, pengisian SSP, perkembangan SSP, pengertian e-Billing pajak, perkembangan SSE, pembuatan kode *billing* dan pengisian SSE.

BAB VII : Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu menerapkan dan melakukan perhitungan PPh Badan terutang, menerapkan dan melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh badan. Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang pengertian dan dasar hukum PPh Badan, subjek dan objek pajak badan, jenis pajak penghasilan badan, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPh Badan terutang, contoh perhitungan PPh Badan terutang, kredit pajak, serta pengisian SSP penysetoran PPh Badan.

BAB VIII : Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu memahami dan mengelompokkan data dalam lampiran khusus: 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8, memahami dan mengelompokkan data dalam lampiran khusus Nomor 1A, melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan dalam formulir No. 1771. Materi pokok yang disusun dalam bab ini memuat tentang lampiran khusus 8A, elemen data pada lampiran 8A, lampiran khusus Nomor 1A, metode

dan tarif penyusutan, metode dan tarif amortisasi, menentukan harga perolehan dan harga penjualan, serta pengisian SPT PPh Badan Formulir No. 1771.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran berhasil membawa peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran (Rahdiyanta, 2016). Pada tiap akhir bab di dalam modul pembelajaran terdapat latihan soal uji kompetensi yang dapat dijadikan sebagai evaluasi oleh peserta didik.

Bahan ajar yang telah komplit disusun akan dievaluasi oleh dosen pembimbing dan didiskusikan kembali dengan guru mata pelajaran Administrasi Perpajakan selaku pengguna bahan ajar. Untuk bagian materi tambahan dan juga pembaharuan peraturan perpajakan yang sebenarnya tidak dibahas pada silabus namun bagi penulis bermanfaat untuk pembelajaran, penulis meminta masukan dari guru yang mengajar mengenai batasan materi yang ingin disusun ke dalam bahan ajar. Hal ini bertujuan agar materi pembelajaran yang disusun tidak menyimpang dari target tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pihak guru sekolah akan memastikan bahan ajar yang dihasilkan sesuai Administrasi Perpajakan. Modul dan *slide* presentasi yang disusun selalu mengikuti kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam silabus mata pelajaran yang ditetapkan oleh pihak SMKS Maitreyawira Tanjungpinang. Materi pokok yang disampaikan pada bahan ajar untuk setiap babnya yaitu Konsep Dasar Perpajakan, Wajib

dengan silabus dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan pihak sekolah. Bahan ajar akhirnya difinalisasikan dan kemudian akan mulai digunakan oleh SMKS Maitreyawira Tanjungpinang pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022.

Manfaat yang dirasakan oleh guru sekolah setelah adanya bahan ajar adalah mempermudah para guru dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan untuk semester kedepannya, dan juga adanya *slide* presentasi yang akan digunakan ketika dalam proses kegiatan mengajar. Dengan adanya modul pembelajaran juga dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pemahaman materi secara mandiri oleh para peserta didik, tidak peduli proses pembelajarannya nanti dilakukan secara tatap muka ataupun jarak jauh. Para guru juga dapat menjadikan hasil uji kompetensi dalam modul pembelajaran yang dikerjakan para peserta didik sebagai bahan evaluasi sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran oleh para peserta didik.

Simpulan

Bahan ajar yang telah dirancang penulis berupa modul dan *slide* presentasi materi pembelajaran

Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Bentuk-Bentuk Dokumen Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang, serta Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Dengan adanya bahan ajar yang dihasilkan, mempermudah para guru sekolah dalam menyampaikan materi pembelajaran di saat proses kegiatan belajar mengajar untuk semester kedepannya. Selain itu, adanya modul pembelajaran juga dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pemahaman materi secara mandiri oleh para peserta didik. Para guru juga dapat menjadikan hasil uji kompetensi dalam modul pembelajaran yang dikerjakan para peserta didik sebagai bahan evaluasi sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran oleh para peserta didik.

Daftar Pustaka

Azizah, W. N. (2017).

Pengembangan Modul
Praktikum Pembelajaran IPA
(Sains) Untuk Mata Kuliah
Pilihan di Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas
Tarbiyah, Institut Agama Islam
Imam Ghazali (IAIG) Cilacap,
1(2), 1–9.

Handarini, O. I., & Wulandari, S. S.
(2020). Pembelajaran Daring
Sebagai Upaya Study From
Home (SFH) Selama Pandemi
Covid 19. *Jurnal Pendidikan
Administrasi Perkantoran
(JPAP)*, 8(3), 496–503.

Rahdiyanta, D. (2016). Teknik
Penyusunan Modul.

Ruangguruku.com. (2012).

Pengertian Pembelajaran dan
Tujuan Pembelajaran. Retrieved
January 21, 2021, from
<https://ruangguruku.com/pengertian-dan-tujuan-pembelajaran/>

Suara.com. (2020). Pembelajaran
Daring Pada Masa Pandemi.
Retrieved January 22, 2021,
from
<https://yoursay.suara.com/news/2020/07/20/175556/pembelajaran-daring-pada-masa-pandemi>

UU Nomor 20 Tahun 2003. Tentang
Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional.
<https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>